

## TRADISI DAN BUDAYA TOLERANSI DALAM TINJAUAN SEJARAH DI ACEH

Nurlaila Nurlaila

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Correspondence: [nurlaila@ar-raniry.ac.id](mailto:nurlaila@ar-raniry.ac.id)

### INFO ARTIKEL

**Info Publikasi:**

Artikel Kajian Library  
Research

**Sitasi Cantuman:**

Nurlaila Nurlaila. (2022).  
Tradisi Dan Budaya  
Toleransi Dalam  
Tinjauan Sejarah Di  
Aceh. *Abrahamic  
Religions: Jurnal Studi  
Agama-Agama (ARJ)*,  
2(2), 116-128.

**DOI:**

[10.22373/arj.v2i1.13892](https://doi.org/10.22373/arj.v2i1.13892)

Hak Cipta © 2022.

Dimiliki oleh Penulis,  
dipublikasi oleh ARJ

Dikirim: Juni 2022

Direview: Juli 2022

Dipublikasi: September  
2022

### ABSTRACT

*The discussion of tolerance has become a hot topic discussed in various studies, both in the form of writing and verbally through various dialogues and forums. Tolerance is an easy topic to discuss in sharing forums, but in its realization and application there is still a lot to learn. The problem of tolerance is a test in itself in society, because although there are many scientific studies that discuss the necessity and obligation of a culture of tolerance in society. But in reality tolerance is always a problem in realizing it. This sometimes becomes difficult in its realization because it is found that there are still many citizens, groups or even certain cultures who are intolerant in various ways. Aceh, an area that applies Islamic law in Indonesia, is a test in itself in implementing a culture of tolerance in Aceh. There were several cases that caused Aceh to become intolerant, starting from the DI/TII rebellion in 1953 which was intolerant of Indonesia, the displacement of other ethnic groups during GAM's burning of houses of worship in Aceh and various other cases that indicated that Aceh was intolerant. Seeing this reality, this study wants to see another angle on the problem of tolerance in Aceh. The author sees from the perspective of culture and history, Aceh is very tolerant in religious matters. So that in the course of Aceh's history they can live, do business, diplomacy and discuss with various religions.*

**Keyword: Tradition, Culture, Tolerance, Aceh History.**

\* \* \* \* \*

### ABSTRAK

Pembahasan tentang toleransi menjadi topik yang hangat di bicarakan dalam berbagai kajian baik di berupa tulisan, maupun pembicaraan secara lisan lewat bergai dialog dan forum. Toleransi menjadi topik yang mudah untuk di bahas dalam berbagai forum namun dalam perwujudan dan aplikasinya masih harus terus banyak belajar. Masalah toleransi menjadi ujian tersendiri dalam masyarakat, karena meski banyak kajian ilmiah yang membahas harus, perlu dan wajibnya budaya toleransi dalam bermasyarakat. Namun kenyataannya toleransi selalu terjadi masalah dalam mewujudkan. Hal tersebut kadang menjadi susah dalam perwujudannya karena didapati masih banyak warga, kelompok atau bahkan budaya tertentu yang bersikap intoleran dalam berbagai hal. Aceh sebuah daerah yang menerapkan syariat Islam di Indonesia menjadi ujian tersendiri dalam menerapkan budaya toleransi di Aceh. Ada beberapa kasus yang menyebabkan Aceh menjadi intoleran mulai dari pemberontakan DI/TII tahun 1953 yang tidak toleran dengan Indonesia, pengusian etnis lain pada saat GAM pembakaran rumah ibadah di Aceh dan berbagai kasus lain yang mengindikasikan Aceh intoleran. Melihat realitas tersebut kajian ini ingin melihat sudut lain dari permasalahan toleransi di Aceh. Penulis melihat dari kaca mata budaya dan sejarah dulu, Aceh sangat toleran dalam masalah agama. Sehingga dalam perjalanan sejarah Aceh bisa hidup, berbisnis, berdiplomasi dan berdiskusi dengan berbagai Agama.

**Kata Kunci:** Tradisi, Budaya, Toleransi, Sejarah Aceh.

\*\*\*\*\*

#### A. Pendahuluan

Kata toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu berasal dari kata *tolerare* yang mempunyai arti sabar membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang atau salah dengan batasan tertentu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang "tidak menyimpang dari hukum berlaku" di suatu negara, dimana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu. (Afrianja, 2022) Dalam bahasa Inggris secara etimologi atau bahasa, toleransi berasal dari kata *tolerance* merupakan kata benda, sedangkan *tolerant* sebagai kata sifat *adjective*. Dalam kamus Bahasa Arab kata toleransi disebut dengan tasamuh yang bertari murah hati dan lapang dada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata toleran berarti bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian pendapat, pandangan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya (KBBI, 1986: 267). Sedangkan dalam American Dictionary toleransi berarti sikap bisa menerima perilaku dan keyakinannya yang berbeda dari anda bahkan jika anda setuju atau tidak setuju dengannya.

Toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama yang didasarkan kepada setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadah dengan sistem dan cara tersendiri yang ditaklifikasikan (dibebankan) serta menjadi tanggung jawab orang yang memeluk atas dasar itu, maka toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah keagamaan, melainkan perwujudan sikap keberagaman pemeluk suatu agama dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama, dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan



umum. (Said Agi, 2005: 13). Toleransi memiliki dua sifat, yaitu toleransi statis dan toleransi dinamis. Toleransi statis adalah toleransi dingin tidak melahirkan kerja sama. Bila pergaulan antara umat beragama hanya dalam bentuk statis, maka kerukunan antara umat beragama hanya dalam bentuk teoritis. Kerukunan dalam bentuk teoritis akan melahirkan toleransi semu. (Afrianja, 2022) Dibelakang teoritis semu terselimum sikap hipokritis. Hingga tidak membuahkan suatu yang diharapkan bersama baik oleh pemerintahan atau oleh masyarakat sendiri. Sedangkan toleransi dinamis adalah toleransi aktif melahirkan kerjasama antar umat beragama bukan hanya dalam bentuk teoritis, tetapi sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa. Perwujudan dari toleransi pergaulan hidup antar sesama umat beragama dapat direalisasikan dengan cara setiap penganut agama mengakui eksistensi agama-agama lain dan menghormati segala hak asasi penganutnya. Dalam pergaulan bermasyarakat setiap golongan umat beragama menampakkan sikap saling mengerti, menghormati dan menghargai (Muhammad & Nurlaila, 2021).

Para ahli sudah banyak sekali mendefinisikan tentang pengertian toleransi baik dari kalangan Islam maupun dari luar kalangan Islam, diantaranya adalah oleh Abdurrahman Wahid yang di kenal dengan bapak toleran Indonesia, menurutnya toleran itu adalah saling menghormati, dialog antar agama. Toleran itu bukan hanya sebatas bisa hidup dengan berdampingan secara damai namun bisa memberi dan menerima secara bersama. Sedangkan menurut Nurhulis Madjid, toleran itu adalah saling menghormati dan menghargai dengan tulus demi terwujudnya keserasian hubungan sosial.

Beberapa dekade yang lalu kita menyaksikan keadaan pendidikan di Indonesia seperti dipaksakan dengan harus seragam di seluruh Indonesia dengan sistem sentralistik. Dengan adanya pendidikan yang “dipaksakan” seseorang pada akhirnya hanya melihat kebudayaan dari sukubangsanya sendiri tanpa melihat ataupun mengenal suku bangsa lain diluar sukubangsanya. Pedoman ini tidak akan masalah jika dalam kehidupan masyarakat tidak pernah bertemu dengan masyarakat lain diluar sukubangsanya. Keadaan akan berubah jika mereka mulai bertemu dengan anggota masyarakat lain di luar suku bangsanya dan hal ini tidak akan pernah dihindari. Pertemuan antar sukubangsa tentunya akan membawa berbagai perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa saling pengertian antar suku bangsa yang saling berinteraksi atau sebaliknya terjadi konflik diantara mereka. Dengan banyak mengenal dan berhubungan dengan orang lain, bangsa lain, budaya lain inilah menjadi tempat membentuk toleransi antar umat beragama.

## **B. Metode Penelitian**

Pembahasan tentang topik budaya dan sejarah toleransi di Aceh dalam katagori penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah lazim juga disebut metode sejarah. Metode itu sendiri berarti cara, jalan, atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Metode sejarah dalam pengertian yang umum adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari pandangan sejarah. Metode sejarah menurut Gilbert J. Garraghan adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan

mengajukan secara sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Pengertian metodologi sejarah ada juga yang mengartikan sebagai sebuah proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.

Dudung Abdurrahman mengemukakan langkah-langkah penelitian sejarah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan objek yang berasal dari suatu zaman dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan.
2. Menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik.
3. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan yang otentik.
4. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya untuk menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti (Dudung, 1999: 43-44).

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif. Bentuk penyajiannya dilakukan dengan metode deskripsi, dengan cara mendiskripsikan semua data yang diperoleh dari sumber perpustakaan. Penelitian ini masuk dalam katagori penelitian sejarah, yang bentuk pembahasannya dan penulisannya digolongkan dalam sejarah lokal, yaitu sejarah dan kisah masa lampau dari kelompok masyarakat yang berada pada daerah geografis Aceh.

### C. Napak Tilas Sejarah Aceh

Aceh terletak di ujung bagian Utara pulau Sumatera, bagian paling Barat dari kepulauan Nusantara. Secara astronomis dapat ditentukan bahwa daerah ini terletak antara 95° 13' dan 98° 17' bujur Timur dan 2° 48' dan 5° lintang Utara. Dengan melihat posisinya yang demikian, Aceh dapat disebut sebagai pintu gerbang sebelah Barat kepulauan Indonesia. Posisi geografis Aceh berda di *gateway* atau pintu gerbang menuju selat Malaka dari Arah Barat. Karena letaknya yang strtegis ini, dalam perjalanan sejarahnya, Aceh banyah didatangi oleh berbagai bangsa asing dengan berbagai macam kepentingan seperti kepentingan perdagangan, agama, ilmu pengetahuan, diplomasi dan sebagainya. Kedatangan berbagai bangsa asing merupakan hal yang penting bagi perkembangan Aceh sendiri, baik secara politik, kultural maupun ekonomis. Meskipun demikian diantara pendatang asing itu terdapat pula pendatang yang melakukan tindakan-tindakan yang didorong oleh kolonialisme dan imperialisme, baik di Aceh maupun disekitarnya.

Karena letak Aceh yang berbatasan dengan laut, maka suatu hal yang lumrah bahwa suku bangsa Aceh mempunyai kebudayaan bahari. Dalam catatan sejarah disebutkan Aceh adalah daerah pertama yang menerima syiar Islam di Nusantara, dimana berdirinya kerajaan Perelak pada abad 9 M dan Kerajaan Samudera Pasai abad 13 M. Tidak jauh dari kedua kerajaan ini telah berdiri pula sebuah kerajaan yaitu Kerajaan Islam Darussalam pada abad 16 M yang menjadi raja pertama adalah Sultan Ali Mughayatsyah yang lokasinya di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar sekarang ini. Dikawasan ini Islam dan perdagangan berjalan beriringan. Kejelian penguasanya dalam



menarik perhatian para pedagang baik regional maupun internasional untuk singgah di pelabuhannya, karena hal itu merupakan suatu hal yang fundamental, inilah diantara faktor penentu yang membuahkan hasil gemilang di Aceh sejak abad 13.

Pada abad 17 M Kerajaan Aceh Darussalam di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) mencapai puncaknya. Di masa kerajaan Aceh pada waktu ini telah memiliki angkatan perang yang kuat baik daratan dan lautan. Kekuatan yang terpenting adalah dengan kepemilikan kapal-kapal galeri yang dimiliki armada lautnya, disamping pasukan gajah yang dimiliki oleh pasukan daratnya. Selain di kerajaan Aceh sendiri yang beribukotakan Bandar Aceh Darussalam, kapal-kapal yang bagus juga ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan yang berada dibawah kuasa atau pengaruh kerajaan tersebut, misalnya Daya dan Pedir. Diantara kapal kapal itu terdapat kapal yang besarnya bahkan melebihi kapal-kapal yang dibuat Eropa pada kurun waktu yang sama (Piet Rusdi, 2007: 5).

Pada masa itu ramada laut dan darat memiliki peran yang sangat penting. Mengingat adanya bangsa pendatang (Portugis) yang ingin menguasai Selat Malaka. Dan juga pada waktu itu perdagangan luar negeri dianggap sangat penting dalam melakukan ekspor dan impor juga dalam hubungan diplomasi ke luar negeri. Sehingga semuanya ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan-paraturan kerajaan Aceh yang disebut dengan *Qanun Meukuta Alam* (M. Khairil Fazal, 2021). Sultan Ali Mughayat Syah, dalam membangun kerajaan Aceh Darussalam, telah menetapkan empat dasar program negara, salah satu diantaranya ialah, membangun armada atau angkatan laut yang kuat, di samping angkatan darat yang telah dibangun semenjak kerajaan Islam Perelak dan Samudera Pasai.

Sultan Alaidin Syah yang lebih terkenal dengan al-Kahar, segera merealisasikan rencana sultan Ali mughayat Syah dengan membangun armada dan angkatan perang yang kuat, sementara tenaga-tenaga ahli teknik untuk keperluan ilmu perang didatangkan dari Turki, Arab dan India. Pada zaman beliau telah dibentuk sebuah armada yang sebahagian prajuritnya terdiri dari janda-janda (*inong balee*) pahlawan-pahlawan yang telah tewas. Armada ini dinamakan dengan armada *inong balee* di bawah pimpinan Laksamana Malahayati, seorang pahlawan wanita yang telah banyak jasa kepada kerajaan. Laksamana Malahayati lah yang telah meninggalkan percobaan pengacauan oleh anggota laut Belanda. Pembangunan angkatan perang ini terus berjalan hingga masa sultan Iskandar Muda yang kemudian beliau memiliki satu prinsip yang menyatakan “siapa kuat hidup, siapa lemah tenggelam” terus memperkuat dan mempermodern angkatan perangnya, darat dan laut.

Aceh sebagai sebuah daerah yang letaknya sangat strategis dalam pelayaran maka suatu hal yang sangat alamiah kemudian terbentuk kerajaan Islam di Aceh dengan nuansa dan karakteristi yang bersifat maritim. Sebagai sebuah kerajaan maritim maka maju mundurnya kerajaan sangat ditentukan oleh penguasaan jalur pelayaran. Kegemilangan maritim Aceh kemudian mencapai kegemilangan pada abad ke 16, yang dikenal dengan adab kebangkitan Aceh Darussalam. Masa keemasan Aceh abad ke 17 (Prayetno, 2021) merupakan hasil kerja para penguasa sebelumnya yaitu abad ke 16. Kejatuhan Malaka ke

tangan Portugis pada tahun 1511 merupakan momentum penting bagi kebangkitan Aceh sebuah kerajaan yang baru saja berdiri. Portugis dianggap oleh masyarakat Nusantara khususnya muslim sebagai musuh agama dan dagang, oleh karena itu, bangsa Portugis dianggap sebagai musuh bersama. Mulai saat itulah Aceh yang telah menunjukkan kemampuan militer, politik dan ekonomi yang tangguh, menjadi tumpuan harapan para pedagang muslim dan non muslim.

#### D. Toleransi Sebagai Wujud Berkembangnya Aceh Saai Ini

Berkembangnya Aceh sebagai kawasan pelabuhan regional dan internasional menjadi Banda Aceh sebagai sebuah kota yang kosmopolitan yang dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia, baik muslim maupun non muslim. Para pedagang muslim umumnya berasal dari Arab, Turki, Persia, Abbysinia, Pegu dan India. Utusan pedagang dari kawasan lain juga berdatangan, seperti Cina, Bealanda, Inggris, dan Perancis (Denny Lombard, 1986: 150-170). Mereka datang ke Aceh untuk melakukan perdagangan dan biasanya akan menetap untuk beberapa lama. Seorang warga Perancis mengunjungi Aceh (tahun 1601-1603) mengatakan bahwa biasanya para pedagang tinggal di Aceh sampai enam bulan. Orang-orang Eropa tidak hanya mendirikan kantor perdagangan di Aceh, akan tetapi juga tinggal disana untuk beberapa lama. Bahkan Thomas Best, umpamanya, pernah memiliki sebuah rumah di Banda Aceh pada tahun 1688, dia pernah menjamu teman senegarannya William Dampier. William Soames juga tinggal di Aceh dari tahun 1696 sampai dengan 1697 (Sudirman, 2007).

Sifat kota Banda Aceh yang kosmopolitan berakibat pada terbukannya Aceh terhadap pengaruh luar. Aceh telah menjadi kawasan majemuk dan terbuka. Penduduknya terdiri atas berbagai etnis dan bangsa, dan juga tentunya dari dimensi budaya akulturasi. Disinilah kita cermati adanya kebijakan yang brilian dari penguasa Aceh ketika itu. Dengan sikap keterbukaan, Aceh mengadopsi apa yang mereka anggap penting dan sesuai dengan kepercayaan dan tradisi dengan kepercayaan dan tradisi mereka. (N. L. Khairil Fazal, 2021) Diantara yang terpenting dari kebijakan tersebut adalah pengadopsian bahasa Melayu merupakan *lingua franca*, bahasa pengantar dalam pergaulan masyarakat nusantara, dan sekaligus juga menjadi bahasa dakwah dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Dengan menulis kitab dalam bahasa Melayu-Jawi akan lebih luas lapisan pembacanya dari pada ditulis dalam bahasa Arab yang lapisan pembacanya pasti lebih terbatas.

Di pesanteren-pesantren (dayah) di Aceh kitab dalam bahasa Melayu ini lebih banyak dipelajari. Hal ini terbuka kemudahan bagi orang luar Aceh yang ingin memperdalam ilmu agamanya dan berguru disana. Media bahasa ini telah mempermudah pergaulan dan mempererat persahabatan antara berbagai orang Nusantara dengan masyarakat Aceh. Kegemilangan kerajaan Islam di Aceh tercatat dalam sejarah di mulai dari kerajaan Islam Perelak. Kemudian di ikuti oleh kerajaan Samudera Pasai. Dalam catatan sejarahnya Aceh bukan hanya pernah berkembang udaya belajar dan intelektual yang terkenal, tetapi juga dikenal sebagai pusat penyebaran pertama agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Sebagai sebuah tempat penyebaran Islam Aceh dituntut secara



alami untuk memenuhi kebutuhan intelektual keislaman. Dikerajaan Pasai tradisi intelektual keislam sangat di dukung oleh pihak kerajaan atau sultan yang sangat memperhatikan pendidikan keagamaan untuk masyarakat ketika itu. Bukti bahwa sultan sangat memperhatikan pendidikan keagamaan masyarakat adalah dari catatan Ibn Batutah yang ketika abad 13 mengunjungi Pasai ia menemukan di kerajaan Pasai terdapat dua ulama besar yang berasal dari Persia yaitu Qdhi Syarif Amir Sayyid dari Syiraz dan Taj al-Din dai Isfahan. Diskusi keagamaan dilaksanakan secara reguler di istana dan mesjid dan sultan juga berperan serta aktif. (Amirul, 2012: 234-2348).

Keterbuakaan masyarakat Aceh terhadap dunia luar juga terlihat bahwa banyak sultan-sultan dari luar Aceh yang memerintah di Aceh dan diterima baik oleh masyarakat Aceh. Diantara sultan yang bersal dari luar Aceh ialah sutlan Iskandar Tsani (1636-1641) dari Pahang. Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Djamaluddin (1699-1702). Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui Ibnu Syarif Hasyim (1702-1703). Sultan Damalul Alam Badrul Munir (1703-1726) ketiganya bersal dari Arab. Kemudian sultan yang mengisi kerajaan aceh juga ada yang bersal dari Bugis daerah Sulawesi selatan yang bernama sultan alaidin Ahmad Syah (Maharaja Lela Melayu) pada tahun 1727-1735 dan beberapa sultan setelahnya (Raden, 1984: 82-84). Selain itu kemajemukan masyarakat Aceh juga terbukti dengan banyaknya nama-nama daerah berdasarkan negeri mereka berasal, maka di Banda Aceh terdapat nama daerah seperti Gampong Keudah (Malasia), Gampong Jawa, Surin (Turki), Bitai, Lamkeneen, dan lainnya yang menunjukkan bahwa masyarakat Aceh sudah terbiasa hidup bendampingan dengan orang lain dari berbagai macam latar belakang budaya dan agama.

Apabila kita merunut ke belakang, nenek moyang kita adalah bangsa yang mempunyai kebudayaan san sejarah dalam bidang maritim. Berbagai bukti masa prasejarah Indonesia dapat memberikan pemahaman bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah sebgain besar bangsa pelaut atau pengembara, dengan menggunakan potensi laut sebagai sarana untuk memenuhi berbagi kebutuhan dan kepentingan antar bangsa, sepeti halnya untuk perdagangan dan tranportasi serta komunikasi dengan bangsa atau daerah lain, serta memanfaatkan sumber daya alam di laut sebagai salah satu sumber mata pencaharian hidup. Perjalanan dari satu pelabuhan tempat pemberangkatan ke pelabuhan lain sebagai tujuan perdagangan pada umunya menghasilkan waktu yang relatif lama Burger menggambarkan pelayaran dari Aceh ke Cina menghabiskan 20 hingga 30 hari. Dengan sendirinya angkut barang menjadi cukup tinggi sehingga harga jual barang dagangan menjadi tinggi juga.

Tidak ada seorang pun yang membantah bahwa Banda Aceh tergolong ke dalam kelompok kota tertua diantara ibu kota dalam kelompok kota-kota tertua di Nusantara. Bersama dengan Malaka ia pernah menduduki posisi penting dalam arus lalu lintas perniagaan Timur dan Barat pada abad ke 16 sampai 17. Akibat nyata dari kebijaksanaan diatas, Banda Aceh Darussalam tumbuh menjadi kota perniagaan yang ramai, Jhon Davis, kapten salah sebuah kapal rombongan Cornilis De Hotman yang berlabuh di Ibu Kota pada tahun 1599, memberikan kesaksian kepada kita bahwa tatkala ia memasuki pelabuhan Aceh, ia menemukan empat buah kapal asing sedang berada di pelabuhan;

yaitu tiga buah berasal dari Arab dan satu dari Pegu. Tiga tahun kemudian Sir James Lancaster yang tiba pada masa pemerintahan Sultan Sidil Mukamul mengatakan bahwa ia menyaksikan 16 atau 18 buah kapal niaga dari berbagai bangsa yang berlabuh di pelabuhan Aceh. Dalam lalu lintas perniagaan internasional itu, posisi kota banda Aceh kelihatannya lebih bersifat entrepot dari komunitas ekspor. Situasi demikian itulah berkaitan erat dengan kondisi dan potensi hinterland ibu kota tidak begitu bantak memproduksi bahan eksport. Beaulieu yang pernah menetap di kota Banda Aceh pada tahun 1621 mencatat produksi lada yang waktu itu merupakan primadona ekspor.

### **E. Rempah Aceh Dan Hubungan Bilatera Terhadap Negara Luar**

Berbagai barang dagangan diperjual belikan, komoditas ekspor terdiri atas hasil hutan atau hasil pekebunan. Lada menjadi primadona ekspor. Sehingga di Aceh terkenal dengan lada minyeuk. Lada ini dikenal sebagai “ raja rempah” di dunia, secara botanikal lada jenis ini disebut piper ningrum yang merupakan salah satu rempah tertua dan terpopuler di dunia. Kehangatan lada telah menjadikan ikon tersendiri hubungan Aceh dengan kerajaan Turki Usmani sejak abad 15 dan 16. Hubungan diplomasi aceh dan Turki terkenal dengan “*lada sicupak*”. Diplomasi ini diterima dengan baik oleh penguasa Turki dengan mengirim 300 ahli senjata dan berbagi keahlian lainnya di Banda Aceh Darussalam. Orang-orang Turki itu di tempatkan di kawasan industri” yang di sebut dengan kampung Pande.

Menurut tradisi lisan yang berkembang di Aceh bibit lada yang ada di Aceh dibawa oleh seorang syekh Abdullah Kan-an seorang ulama dan ulara yang berasal dari Palestina. Beliau datang bersama ayahnya untuk menyebarkan Islam di Perelak sekitar abad 12. Kemudian beliau datang mengislamkan kerajaan Lamuri di Aceh Besar. Beliau meninggal di Aceh Besar dan daerah Lhok ‘Nga sekarang. Tempat penguburan beliau terkenal dengan gampong Lampeneun, dan nama gampong ini juga diambil dari nama beliau teungku Chik Lampeneun karena dari Kan-an. Kebiasaan kenduri lada dalam masyarakat Aceh di niatkan untuk menghormati dan mendoakan beliau. (Ali Hasmy, 1986: 24). Karena kehangatan dan keuntungan perdagangan lada di Aceh yang menyebabkan kolonian Belanda kemudiaan bersikukuh dan sangat berniat untu menguasai Aceh. Dengan berbagai alasan dan berbagai diplomasi akhirnya Belanda menguasai Aceh.

Kedatangan Belanda ke Aceh memperlihatkan sisi lain dari dinamika sejarah “keunikan“ dan keberagaman etnis dan agama di kota Banda Aceh hingga saat ini. Keadatang Belanda di Kota Banda Aceh tahun 1873 dan 1874 telah membawa perubahan, terutama terhadap komposisi demografi keberagaman etnis dan agama di kota ini. Hal inilah yang turut memberikan warna tersendiri terhadap pluralisme kota ini kendati kota ini sudah berpredikat sebagai ibu kota provinsi Aceh yang mayoritas masyarakatnya penganut agama Islam, tidak berarti disini tidak tumbuh budaya toleransi dalam etnik dan agama. Sejak tahun 1973, kota BandaAceh menjadi ajang kontestasi perang yang lama dan dahsyat. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk kota ini, terutama orang Aceh menyingkir ke luar pusat kota Banda Aceh. Banyak diantaranya





menyingkir untuk berjuang bersama dengan pasukan kesultanan Aceh yang dipimpin oleh panglima, ulama dan loyalitas sultan Alaidin Mahmud Syah. Selain itu para orang tua, perempuan dan anak-anak menghindari perang yang terjadi di dalam kota saat itu.

Pendudukan Belanda di Kota Banda Aceh memperlihatkan fakta tentang perubahan nyata teradap komposisi penduduk setelah pusat kota dikuasai mereka. Gambaran itu tampak dari keberagaman etnis dan komposisi jumlah penduduk berbagai etnis sejak 1874 sampai 1930 di kota Banda Aceh. Data kolonial menunjukkan bahwa penduduk kota pada masa itu lebih banyak di huni etnis pendatang dan bukan orang Aceh. Data *Violstelling* 1930 menunjukkan dengan nyata komposisi penduduk kota Banda Aceh pada saat itu sebagai berikut; etnis Cina sebanyak 10.726 jiwa; etnis Jawa sebanyak 1,937 jiwa, dan etnis Padang sebanyak 482 Jiwa. sedangkan orang Aceh yang bertahan di kota ini hanya berjumlah 746 jiwa saja (Teuku Syamsuddin, 1996).

Hal ini berdampak terhadap kemunculan bangunan rumah ibadah, sejak tahun 1974. Mulai muncul berbagi rumah ibadah dan rumah pembakaran mayat orang Hindu di Kota Banda Aceh. Khusus penganut Katolik, Belanda mendidikan rumah ibadah yang di kenal dengan gereja ayam, karena menggunakan lambang ayam jantan di menaranya. Gereja ini pada tahun 1926 dinamakan menjadi gereja Katolik Hati Kudus. Sejarah kedatangan kristen di Banda Aceh, beriringan dengan masuknya Belanda tahun 1873. Karena mereka butuk pelayanan dalam ibadah maka pada tahun 1974 didatangkan seorang Pastor bernama Henricus C. Verbraak SJ, mendarat di Ulee Lhee pada Juni 1974 setelah menempuh perjalanan dari Sumatera barat sebagai Pastor dalam melayani para jemaatnya. Ia tinggal di bangunan sederhana yang merupakan bagian dari istana kerajaan Aceh yang telah dikuasai oleh Belanda sampai tahun 1877 yang melayani 2000 orang jemaat. 1500 adalah tentara Belanda.

Karena tempatnya pelayanan jemaat kurang layak kemudian membangun sebuah kapel atau pastoran sederhana dengan bahan bangunan kayu dan bambu yang dibantu oleh para tentara Belanda. Namun karena daerah tersebut sering terjadi banjir, bangunan tersebut tidak bertahan lama. Baru pada tahun 1884 pada saat penguasa militer di pimpin oleh Van de Haiden, memberikan izin untuk mendirikan bangunan rumah ibadah yang lebih baik lagi. Kapel gereja yang baru itu dibangun dengan menara yang tinggi berbahan dari kayu dan berkualitas lebih bagus dan lebih kuat dari pada sebelumnya. Pada tahun 1885, kapel selesai dibangun dan digunakan untuk perayaan hari raya Paskah. Verbraak bertindak sebagai pinpinann kapel dan Pastoran di banda Aceh hingga tahun 1907. Dan kemudian ia mengunduran diri karena faktor kesehatan kurangnya penglihatan setelah 33 tahun ia mengabdikan.

## **F. Rumah Ibadah Sebagai Wujud Budaya Toleransi Di Aceh**

Seiring dengan perjalanan waktu, jumlah penganut Katolik yang menjadi jemaat di kapel ini semakin bertambah dan beragam. Tidak hanya tentara Belanda saja yang beribadah, masyarakat sipil, pegawai pemerintahan dan pedagang dari kalangan Tionghoa pun beribadah disana, sehingga kapel tersebut sudah tidak mampu menampung jumlah jemaatnya lagi. Kemudian dibangunlah sebuah gereja baru yang mampu menampung

para jemaat tersebut. Kapel itupun lalu di pugar dan dibangun menjadi yang lebih luas, akhirnya bangunan gereja itu diresmikan pada 26 September 1926 oleh Pastor Augustinus Huijbregrets. Gereja ini dibangun dengan gaya arsitektur neoklasik modern. Hal ini disesuaikan dengan iklim tropis Kota Banda Aceh. Gereja ini memiliki luas bangunan 12x 14 meter, dilengkapi dengan menara dengan tinggi 12 meter yang di atasnya terdapat lambang ayam jantan. Lambang ayam jantan inilah yang melahirkan julukan menjadi gereja ayam atau gereja Hiti Kudus.

Dalam sejarahnya Gereja Katolik Hati Kudus menjadi salah satu gereja terindah di Indonesia. Interior gereja di bagian jendela menggunakan kaca berwarna jenis *stained glass* dengan lantai keramik berwarna warni yang disusun berbentuk mozaik. Konon lantai keramik dan loncengnya semuanya didatangkan secara khusus dari Belanda. Gereja Hati Kudus bukankah satu-satunya gereja yang ada di kota Banda Aceh. Tiga gereja lainnya yang didirikan pada masa belanda juga salah satu fakta tentang toleransi di Aceh yaitu Gereja Indonesian Bagian Barat (GPIB) di jalan Pocut Baren yang bersebelahan dengan Gereja Methodis Indonesia (GMI) di Kapung Mulia. Selain itu juga ada gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Berbagai rumah ibadat tersebut lahir dan hadir menghiasi indahnyakeberagaman dan keberagaman ibu kota Banda Aceh yang mayoritas penduduknya pemeluk Islam.

Selain agama katolik yang sudah ada gereja yang sangat indah di Aceh hingga saat ini. Agama protestan juga mendapat perhatian khusus di Aceh di lihat dari pemerintah dan rakyat Aceh sejak dahulu. Masuknya penganut protestan di Aceh bersamaan dengan berjalannya kolonialisme Hindia Belanda. Mereka mendatangkan para penganut kristen protestan tersebut dari kalangan militer hasil rekrutan di Ambon Maluku, dan Manado Sulawesi Utara. Mereka didatangkan ke Kota banda Aceh ketika mengemban tugas kedinasan di kemiliteran Hindia Belanda melawan pejuang Aceh. Pada awal keberadaan Hindia Belanda di Aceh, mereka menugaskan rohaniawan kristen Protestan yang bernama Pendeta Pattiselano sebagai pendeta militernya. Namun kemudian Pendeta Pattiselano digantikan oleh pendeta militer lainnya bernama pendeta Izzaac Dominic Thenu (Rusdi Sufi, 1993).

Pada saat perang terus berkecamuk di Aceh, pemerintah Hindia Belanda membuat suatu sistem pemerintahan yang disebut dengan lini konsentrasi. Mayor jendral A.W.P Weizel untuk memagari kota ini dari serangan pejuang Aceh. Sistem ini yang menjadikan mereka sangat tidak nyaman dan leluasa dalam menata pembangunan Kota banda Aceh, karena selalu mendapat serangan dari pejuang Aceh saat itu. Setelah penyerahan diri Sultan Alaidin Muhammad Daut Syah pada awal tahun 1903, mereka baru leluasa dalam membangun kota ini karena perang dan serangan pejuang Aceh mulai mereda. Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun rumah ibadah bagi anggota militernya yang beragama kristen di banda Aceh sejak tahun 1911. Perkenalan Aceh dengan Kristen Protestan sebenarnya tanpa diduga telah terjadi sejak 9 agustus 1602. Pada saat itu telah terbangun hubungan diplomasi yang baik antara Kesultanan Aceh dengan Kerajaan Belanda (PDIA, 1990: 18).



Pada tahu 1911 juga didirikan juga didirikan rumah ibadah Kristen Protestan di Banda Aceh dengan nama *Indiesche Kerk* yang di bangun khusus untuk para penganut protestan yang bertugas di kemiliteran Hindia Belanda di Kota Banda Aceh. Rumah ibadah ini kemudian lebih dikenal dengan nama “Gereja Ambon”. Munculnya nama tersebut karena pada awalnya gereja ini dikelola oleh para pengurus di dominasi oleh orang-orang Ambon yang berdinasi di kemiliteran Hindia Belanda yang ada di Kota Banda Aceh terutama *Korps Marechaussee*. Pembangunan rumah ibadah *Indische Kerk* di Banda Aceh hanya sebagai tempat ibadah semata, bukan untuk penyebaran agama Kristen protestan di Aceh. Oleh karena itu para penganutnya di Banda Aceh sering mengalami pasang surut sangat tergantung dari kedatangan dan kepulangan para penganut Kristen Protestan di Aceh di Kota ini.

Pendeta Pittiselano yang pertama kali memimpin jemaat militer Kristen Protestan di Aceh berasal dari Ambon, Maluku, kemudian digantikan oleh Pendeta Izaak Dominic Thenu, penehat militer Belanda yang sangat di hormati dan oleh Hindia Belanda dan sangat di takuti oleh Aceh karena kekejamannya. Ia juga berasal dari Ambon, Maluku, meninggal tahun 1937 digantikan oleh pendeta Manuputty pimpinan jemaatnya bernama W. Aipasa yang juga berasal dari etnis Ambon, Maluku. Akibatnya gereja ini dikonotasikan oleh penganut Krsiten Protestan dan etnis lainnya sebagai “Gereja Ambon”. Ketika kolonial Hindia Belanda berakhir dan mereka meninggalkan Kutaraja, Jepang menggunakan bangunan Gereja *Indische Kerk* sebagai gudang makanan sejak sejak 12 Maret 1942. Mereka juag menjadikannya sebagai tempat pemotongan daging untuk para prajuritnya di Kutaraja. Pada tahun 1948, gereja ini dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai tempat untuk penganut Kristen Proterstan di kota Banda Aceh. Pada tahun itu juga *Indesche Kerk* di serah terimakan kepada GPIB, termasuk gedung *Indesche Kerk* Kuta Raja menjadi GPIB Kota Banda Aceh. Pengambilalihan ke GPIB juga di ikuti oleh perpindahan ke alamat baru yang dahulunya berada di jalan antra jalan Teungku Chik Ditiro dengan jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah, daerah Kodim 0101 sekarang di pindahkan ke alamat baru di jalan Pocut Baren, Kampung Mulia di samping Gereja Metodis. (Noer Abijono, 1977: 7).

Sejak tahun 1974-1978 dominasi etnik Ambon sebagai penganut utama Kristen Proterstan di GPIB Kota Banda Aceh mulai berakhir. Pada itu terpilih Akab Sebayang dari etnis Karo sebagai ketua majelis jemaat GPIB Kota Banda Aceh. Sejak saat itu, etnis Ambon, Maluku tidak begitu dominan lagi di struktur pengurus GPIB kota Banda Aceh, pada saat itu, struktur di gereja Kristen Protestan ini telah di dominasi etnis Gayo. Pada tahun 1977, Majelis Sinode GPIB di Jakarta mengirimkan pendeta Ds. Thaofilus Natunnea menjadi pendeta jemaat GPIB Kota banda aceh sudah memiliki pendeta jemaatnya sendiri. Pendeta ini juga merangkap sebagai pendeta jemaat di GPIB kota Sabang. GPIB Kota banda Aceh menjadi salah satu bangunan rumah ibadat “ikonik” dari sejarah Kristen Protestan di Kota banda Aceh sebagai bukti akan adanya keberagaman etnis dan agama di kota Banda Aceh. Bukti itu semuanya menjadikan semuanya sebagai bukti sejarah dan budaya Aceh toleransi sudah diadopsi dan sudah praktekkan ratusan

tahun silam. Semoga semangat tolong-menolong terus menjadi budaya dalam perjalanan sejarah di Aceh saat ini.

### **Kesimpulan**

Toleransi menjadi suatu yang menghebohkan di berbagai media masa saat ini. Apalagi setelah pemboman WTC tahun 2001 dan pada saat isu terorisme mendunia dan berbagai kasus lain yang terjadi akibat konflik atas nama agama masalah toleransi terus menjadi perbincangan hangat. Masalah toleransi di bahas dalam berbagai sudut pandang termasuk sudut pandang sejarah dan budaya. Aceh sebagai sebuah daerah yang menetapkan syariat Islam di Indonesia menjadi ajang pertarungan sendiri dalam pengamalan toleransi di tambah lagi dengan berbagai kasus dan konflik atas nama agama, sehingga pernah di label Aceh salah satu daerah yang intoleran di Indonesia. Aceh sebagai sebuah daerah yang letaknya lekat di ujung pulau Sumatera yang berbatasan dengan laut, menjadikan kehidupan masyarakat Aceh menjadi kerajaan yang bersifat maritim, artinya sebuah kerajaan yang mengandalkan laut untuk sebuah capaian dan kemajuan. Artinya kerajaan akan maju bila kerajaan tersebut dapat menguasai dan menaklukkan laut artinya kekuatan armada dan pelayaran harus dikuasai.

Bukti nyata tersebut adalah bahwa Aceh pernah berdiri kerajaan kuat seperti Perak, Samudera Pasai, dan Aceh Darussalam dengan mengandalkan laut sebagai basis kekuatan. Karena menguasai armada laut yang kuat maka suatu hal lumrah bila masyarakat Aceh sejak dahulu sudah berhubungan dengan dunia luar yang berbeda agama dan budaya dengan bangsa Aceh. Meskipun berbeda agama dan budaya rakyat Aceh sudah berhasil menjadikannya kenjasa dalam berbagai bidang dengan bangsa dan agama lain sejak dahulu, sehingga dapat membawa kemakmuran dan kemajuan dalam sejarah Aceh yang terkenal ke tingkat internasional. Kedatangan kolonial Belanda di Aceh bukanlah dambaan atau harapan dari rakyat Aceh. Kehadiran Belanda yang telah memporak-porakkan kehidupan masyarakat Aceh dalam berbagai bidang. Kolonial Belanda pada saat tinggal di Aceh telah banyak membangun berbagai fasilitas termasuk rumah ibadah. Ada beberapa rumah ibadah yang dibangun di Aceh diantaranya gereja Kristen Katolik, vihara dan juga gereja untuk Kristen Protestan yang dikenal kemudian dengan GPIB Aceh. Awal pendirian rumah ibadah tersebut memang diperuntukkan untuk keperluan mereka para kolonial dalam beribadah yang umumnya beragama Kristen. Namun pada saat kemerdekaan dan saat pengalihan aset pemilikan negara semua rumah ibadah yang pernah didirikan oleh para kolonial tidak ada yang robohkan atau di hancurkan. Semua masih berdiri dengan utuh, malah kalau harus dipindah karena pembangunan jalan juga diizinkan kembali untuk didirikan seperti gereja GPIB. Berdasarkan perjalanan sejarah dan budaya di atas, Aceh sudah sangat lama hidup dengan budaya toleransi, dan sampai sekarang bisa di rawat toleransi tersebut.

### **REFERENSI**

- Ali Hasmy, *Para Ulama di Aceh*, Banda Aceh: Balai pelestarian Budaya Aceh, 1986.  
Amirul Hadi, *Sejarah Aceh*, Jakarta: Obor, 2012.  
Denny Lombard, *Kerajaan Aceh*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

- Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, 1986.
- Noer Abijono, *Streetif Etnik Antar Kelompok Etnik dalam Jemaat GBIP Banda Aceh*, Banda Aceh: Pusat Pelatihan Ilmu-Ilmu Sosial, 1977.
- PDIA, *Perang Kolonial Belanda di Aceh*, Banda Aceh: PDIA, 1990.
- Piet Rusdi “Angkata Laut Pada Masa Kerajaan”, *Buletin Haba*, no 44 tahun 2007
- Raden Hoesein Djayadiningrat, *Kesutanan Aceh*, Banda Aceh: Balai Pelestarian Adat dan Budaya Aceh, 1984.
- Rusdi Sufi, *Perkampungan di Perkotaan Banda Aceh*, Banda Aceh: Depdikbud, 1993.
- Said Agi Husain al-Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Sudirman, Tradisi Intelektuan dan Budaya Toleran di Aceh, Dalam *Jurnal Haba*. No 45 edisi November Desember 2007
- Teuku Syamsuddin, *Pemetaan Suku Bangsa Melalui Aspek Budaya di Kota Madya Banda Aceh*, Banda Aceh: Depdikbud Balai Kajian Sejarah dan Nilai tradisional Banda Aceh 1995/1996.
- Afrianja, N. (2022). EKSISTENSI UMAT BUDHA DI KOTA BLANG PIDIE: TELAHAH HUBUNGAN SOSIAL KEAGAMAAN. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.22373/arj.v2i1.12093>
- Khairil Fazal, M. (2021). Hubungan Simbiosis Masyarakat Aceh Besar Dengan Tradisi Hindu. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/abrahamic>
- Khairil Fazal, N. L. (2021). Multikultural Perspektif Sosiologis. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/abrahamic>
- Muhammad, M., & Nurlaila, N. (2021). ARUS TOP-DOWN DAN BOTTOM-UP PADA GERAKAN DIALOG ANTAR AGAMA DI INDONESIA. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2), 159. <https://doi.org/10.22373/arj.v1i2.10659>
- Prayetno, N. S. (2021). TRADISI PEUSIJUEK SEBAGAI SARANA MEDIASI DITENGAH SYARIAT ISLAM DI ACEH. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(2), 172. <https://doi.org/10.22373/arj.v1i2.10727>